

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perusahaan adalah sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan dan diterapkan guna mencapai suatu kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan yang baik akan berpengaruh pula pada kualitas laba. Pencapaian kinerja yang baik dalam perusahaan perlu didukung dengan adanya Good Corporate Governance (GCG). GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. GCG merupakan prinsip yang sangat penting digunakan sebagai landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dengan etika bisnis yang berlaku. Menurut KNKG 2006, penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

GCG diterapkan pada berbagai bentuk perusahaan diantaranya adalah Bank, dan BUMN. Namun pada manufaktur belum ada peraturan GCG yang dikeluarkan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Bab 1 pasal 1 poin 6 menyatakan bahwa, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank

yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bab I Pasal 1, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Berdasarkan pasal tersebut Bank dan BUMN melaksanakan tanggungjawabnya.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Dengan adanya peraturan tersebut, Bank dan BUMN telah menjalankan peraturan pemerintah dengan menggunakan Two Tier system. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 22 Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 33 yang menjelaskan bahwa anggota dewan direksi dan dewan komisaris dilarang merangkap jabatan dalam satu perusahaan

pada waktu yang sama. Namun pada pasal 7 peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada satu lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat dikatakan bahwa dewan komisaris pada Bank dapat merangkap jabatan pada perusahaan bukan lembaga keuangan. Direktur utamayang terdiri dari direktur utama dan juga anggotanya atau sering juga disebut CEO (Chief Executive Officer) adalah jabatan tertinggi di suatu perusahaan dan mempunyai tugas untuk memimpin suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk kestabilan perusahaan tersebut. Sedangkan dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006).

Peran CEO dan dewan komisaris dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Dewan direksi dan dewan komisaris memiliki fungsi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan bersama-sama.

Adapun perusahaan memiliki CEO yang berperan ganda (*CEO duality*). *CEO duality* mengacu pada situasi ketika CEO perusahaan merangkap sebagai ketua dewan komisaris (Sridharan, Marshinko 1997). Saleh et al. (2005) dalam Gumanti dan Prasetiawati (2011) membuktikan bahwa dualitas peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, praktik manajemen laba justru semakin banyak dijumpai pada perusahaan dimana ada anggota dewan komisarisnya yang juga menjadi anggota dewan direksi. Hal ini dapat dimaknai

bahwa peran atau fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh dewan komisaris tidak dapat dijalankan dengan baik karena yang bersangkutan harus mengawasi dirinya sendiri.

Selain *CEO duality*, adapun *Interlocking Directorship* yang banyak terjadi di Indonesia. *Interlocking directorship* adalah hubungan yang terjadi antara dewan direksi dari salah satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Begitu juga dalam penelitian Mizruchi (2002) yang menyatakan bahwa perusahaan *Interlocking Directorate* terjadi ketika satu orang terkait dengan suatu organisasi dan menjadi dewan direksi di organisasi yang lain pula.

Peran CEO dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Apabila CEO dapat berperan baik dalam mengelola perusahaan maka kinerja perusahaan akan menjadi baik. Kinerja perusahaan yang baik tercermin dalam kualitas laba perusahaan. Begitu pula dengan *CEO duality*, berpengaruh pada kinerja perusahaan. Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Sridharan dan Marshinko (1997) menunjukkan bahwa *CEO duality* adalah "adanya sinyal pemisahan manajemen keputusan dan kontrol keputusan" yang akan menyebabkan "kompetisi organisasi yang buruk untuk bertahan hidup". Dualitas CEO telah disalahkan atas buruknya kinerja perusahaan seperti perusahaan Sears, Westinghouse, General Motors dan IBM (White dan Ingrassia, 1992 dalam Sridharan dan Marshinko, 1997).

Dalam pembelaannya dari dualitas *CEO*, Anderson dan Anthony(1986) dalam Sridharan dan Marshinko (1997) berpendapat bahwa ia menyediakan "satu titik fokus untuk kepemimpinan perusahaan" dengan misi organisasi berpotensi

lebih jelas dan strategis. Menurut sudut pandangnya dualitas *CEO* meminjamkan stabilitas dan kontinuitas organisasi yang pada gilirannya akan menyebabkan kinerja perusahaan yang unggul.

Kualitas laba adalah kemampuan laba yang dilaporkan untuk mencerminkan pendapatan bersih perusahaan, serta kegunaan dari laba yang dilaporkan untuk memprediksi laba masa depan (Bellovary et al., 2005 dalam Pinasti dan Asnawi, 2009). Kualitas laba merupakan karakteristik penting dari pelaporan keuangan (Francis et al., 2006 dalam Pinasti dan Asnawi, 2009). Berbagai pihak berkepentingan dengan kualitas laba, diantaranya adalah investor untuk kepentingan keputusan investasinya, pengguna laporan keuangan untuk kepentingan contracting, dan bahkan badan penyusun standar akuntansi juga memandang kualitas laba sebagai indikator tidak langsung atas kualitas standar pelaporan keuangan (Penman, 2003; Schipper & Vincent, 2003) dalam Pinasti dan Asnawi 2009.

Kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Informasi pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang (Lev dan Thiagarajan, 1993).

Prediktabilitas laba akuntansi merupakan kemampuan laba akuntansi di masa lalu untuk memprediksi laba akuntansi di masa yang akan datang, dan ditunjukkan dalam variansi goncangan laba akuntansi (*variance of earnings shocks*) dalam laba akuntansi runtut waktu (Lipe, 1990). Prediktabilitas laba

merupakan salah satu pengukuran kualitas laba perusahaan. Sehingga dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi laba masa yang akan datang. Kemampuan *CEO Duality* dan *interlocking directorship* dalam memprediksikan laba masa mendatang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk mengambil keputusan investasinya dengan melihat informasi laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengambil judul penelitian, yaitu **“Pengaruh *CEO duality* dan *Interlocking Directorship* Terhadap Prediktabilitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah *CEO duality* berpengaruh terhadap prediktabilitas laba?
2. Apakah *Interlocking Directorship (ID)* berpengaruh terhadap prediktabilitas laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *CEO duality* terhadap prediktabilitas laba.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Interlocking Directorship* terhadap prediktabilitas laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi acuan pengukuran kualitas laba dengan metode pengukuran prediktabilitas laba. Serta dapat menjadi acuan tentang pengaruh *CEO duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap prediktabilitas laba.

2. Bagi STIE Perbanas

Dapat digunakan sebagai literatur penelitian tentang pengaruh *CEO duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap prediktabilitas laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diawali dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang analisis data yang dimulai dari gambaran subyek penelitian, analisis data yang meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya dengan memperhatikan keterbatasan penelitian.